DAFTAR PUSTAKA

Buku Petunjuk Uraian Prosedur Kerja Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jendral Pajak

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1995.

R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Pajak*, 1999.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1998.

Waluyo, DR., M.Sc., MM., Ak., *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

☐ Masa Pajak ....

☐ Pembetulan Masa Pajak .... Ke-....

FORMULIR

1195

PERHATIAN :
- BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN
- DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK
- BERI TANDA X DALAM ☐ YANG SESUAI
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK
- ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

☐ Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK

1. N P W P : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
2. N P P K P : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Tanggal ☐☐ ☐☐ ☐☐
3. Nama PKP :
4. A l a m a t : Kode Pos ☐☐☐☐☐
5. Nomor Telepon :
6. Merek Usaha :
7. Ijin Sentralisasi : No. Tanggal ☐☐ ☐☐ ☐☐
8. Jenis Usaha : KLU ☐☐☐☐☐

Kode Cabang : ☐☐

Perubahan Identitas :
- ☐ Nama Baru
- ☐ Alamat Baru
- ☐ No. Telepon Baru
- ☐ Jenis Usaha

B. PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN

	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) Bulan ini	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) s.d. Bulan ini
1. Penyerahan yang Terutang PPN				
1.1. Ekspor :				
1.1.1. Dengan L/C	B.1.1.1			
1.1.2. Tanpa L/C	B.1.1.2			
1.2. Penyerahan yang PPN-nya				
1.2.1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	B.1.2.1			
1.2.2. Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	B.1.2.2			
1.3. Penyerahan yang Terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/ Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)				
1.3.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN	B.1.3.1			
1.3.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	B.1.3.2			
1.3.3. Pemakaian sendiri/Pemberian cuma-cuma	B.1.3.3			
1.3.4. J u m l a h (1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)	B.1.3.4			
1.3.5. Penyerahan dengan Tarif Efektif	B.1.3.5			
1.3.6. Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN	B.1.3.6			
1.4. Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)	B.1.4			
2. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN				
2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1			
2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2			
2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1 - 2.2)	B.2.3			
3. Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3			

C.	PAJAK KELUARAN	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Pajak Keluaran :				
	1.1. Dengan Tarif 10% yaitu 10% x (kode B.1.3.4.)	C.1.1			
	1.2. Dengan Tarif Efektif yaitu ..... % x (Kode B.1.3.5)	C.1.2			
	1.3. Jumlah (1.1 + 1.2)	C.1.3			
2.	Dikurangi PPN atas Retur Penjualan dari penyerahan yang terutang PPN	C.2			
3.	Jumlah (1.3 - 2)	C.3			
4.	Dikurangi :				
	4.1. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN :				
	4.1.1 SSP telah diterima (terlampir)	C.4.1.1			
	4.1.2 SSP belum diterima	C.4.1.2			
	4.2. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	C.4.2			
5.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (3 - 4.1.1 - 4.1.2 - 4.2)	C.5			
D	PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN				
1.	Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan :				
	1.1. Pajak Masukan Impor	D.1.1			
	1.2. Pajak Masukan Dalam Negeri	D 1.2.			
	1.3. Pajak Masukan dari Masa Pajak yang tidak sama				
	1.3.1. PPN Impor	D.1.3.1			
	1.3.2. PPN Dalam Negeri	D.1.3.2			
	1.4. Dikurangi PPN atas Retur Pembelian	D.1.4			
	1.5 Lain-lain	D.1.5			
	1.6 Jumlah (1.1 +1.2 + 1.3.1 +1.3.2 -1.4 + 1.5)	D.1.6			
2.	Pajak Masukan yang Menggunakan Pedoman Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	D.2			
3	Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	D.3			
4.	Dikurangi :				
	4.1. Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan	D.4.1			
	4.2. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan	D.4.2			
5.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (1.6 + 3 - 4.1 - 4.2) atau (2 + 3)	D.5			
E	PAJAK YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR				
	1. ☐ Kurang dibayar (C.5 - D.5)	E.1			
	2. ☐ Lebih dibayar (D.5 - C.5)	E.2			
	Jumlah pada Kode E.1 telah dilunasi tanggal				
F	JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN				
G	PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)				
	Hasil Pembetulan :				
	1. ☐ Kurang dibayar	G.1			
	2. ☐ Lebih dibayar	G.2			
	Jumlah pada Kode G.1 telah dilunasi tanggal				

H. KOMPENSASI/PENGEMBALIAN (RESTITUSI)

Kelebihan PPN tersebut pada :

1. ☐ Kode E.2
2. ☐ Kode G.2 (untuk pembetulan)

Diminta untuk :

3. ☐ Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya — Rp. _____
4. ☐ Dikembalikan (Restitusi) — Rp. _____

4.1. ☐ Dokumen dilampirkan 4.2. ☐ Dokumen disusulkan

Pengembalian (Restitusi) disebabkan : 4.3. ☐ Ekspor BKP 4.4. ☐ Penyerahan kepada Pemungut PPN 4.5. ☐ Lain-lain

5. Pengembalian (Restitusi) yang diterima oleh PKP Eksportir atau PKP yang menyerahkan BKP/JKP kepada Pemungut PPN selama 6 (enam) bulan terakhir (dalam ribuan rupiah).

Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan .....
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

I. KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DAN PENYERAHAN AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN	DASAR PENGENAAN PAJAK	PPN
1. Kegiatan membangun sendiri 1.1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = 40 % x jumlah biaya yang dikeluarkan	Rp.	
1.2. PPN yang terutang : 10% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)		Rp.
Jumlah pada kode 1.1.2 telah dilunasi tanggal		
2. Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	Rp.	Rp.
Jumlah pada kode 1.2. telah dilunasi tanggal		

J. LAMPIRAN

1. ☐ Formulir 1195 A1 ; ☐ 1195 A2 ; ☐ 1195 A3
2. ☐ Formulir 1191 B1 ; ☐ 1195 B2 ; ☐ 1195 B3 ; ☐ 1195 B4
3. ☐ Formulir 1195 BM (dilampirkan hanya bagi PKP yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah)
4. ☐ Surat Keterangan PPN Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP tersebut pada kode B.1.2.
5. ☐ Faktur Pajak tentang PPN Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP tersebut pada Kode B.1.2.
6. ☐ Dokumen tersebut pada Kode H.4.1. sebanyak ..... lembar
7. ☐ Surat Kuasa Khusus tersebut pada Kode K.2.
8. ☐ Lembar ke - 3 SSP tersebut pada ☐ Kode C.4.1.1; ☐ Kode C.4.2; ☐ Kode D.1.1; ☐ Kode D 1.3.1; ☐ Kode D.1.3.2; ☐ Kode E.1; ☐ Kode G.1; ☐ Kode 1.1.2 dan ☐ Kode 1.2.
9. ☐ Lembar ke - 3 SSP yang diterima dalam bulan ini dari kode C.4.1.2. SPT Masa PPN bulan-bulan yang lalu sebanyak ..... lembar = Rp. _____
10. ☐ Keputusan Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan pada Kode D.4.1.
11. ☐ .....

K. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah **benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat.**

PERHATIAN :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 1994, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

.....tgl. ....

Tanda tangan :
Nama Jelas :

Cap Perusahan (jika ada)

1. ☐ PKP
2. ☐ Kuasa

L. DIISI OLEH DINAS

Diterima	Dicatat	Diedit	Direkam	Rik Sederhana	Rik Lengkap	Berkas (arsip)

1. ☐ Tepat Waktu
2. ☐ Terlambat

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - I
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

☐ Masa Pajak ....

☐ Pembetulan Masa Pajak . ...Ke-....

FORMULIR

1195 A1

NAMA P.K.P :

N.P.W.P : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

N.P. P.K.P. : ☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐ Tgl. Pengukuhan PKP : ☐☐ ☐☐ ☐☐

No.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P	Faktur Pajak		PPN (rupiah)	PPn BM *) (rupiah)
			No. Seri	Tanggal		
I	2	3	4	5	6	7
I	Faktur Pajak Sederhana					
II	Pemungut PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 A3)					
III	Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN					
1.						
2						
3.						
dst.						
	JUMLAH (tidak termasuk Pajak Keluaran pada Formulir 1195 A2)					

REKAPITULASI :

	PPN	PPn BM
1. Faktur Pajak Sederhana	Rp.	Rp. .....
2. Faktur Pajak kepada Pemungut PPN	Rp.	Rp. .....
3. Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	Rp. ..... +	Rp. ..... +
4. Jumlah PPN (pindahkan ke Formulir 1195 kode C 1.3) dan PPn BM (Pindahkan ke formulir 1195 BM kode C.6)	Rp.....	Rp. .....
5. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN (PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.2 dan PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.7)	Rp. (.....)	Rp. (.....)
6. Jumlah (PPN pindahkan ke Formulir 1195 Kode C3)	Rp.	Rp.. .....

.....tgl.....

Tanda tangan :

Nama jelas :

CATATAN :

*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah

K.P. PPN 1.1.1 - 95

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - II
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM YANG TIDAK DIPUNGUT/ DITUNDA/DITANGGUHKAN/DIBEBASKAN/DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

☐ Masa Pajak ....

☐ Pembetulan Masa Pajak . ... ke-....

FORMULIR

1195 A2

NAMA P.K.P :

N.P.W.P :

N.P. P.K.P. : ☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Tgl. Pengukuhan PKP : ☐☐ ☐☐ ☐☐

No.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	KETERANGAN**)
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan yang PPN/PPn BM-nya Dibebaskan/DTP						
II	Faktur Pajak Standar						
1. 2. 3. dst. .							
	JUMLAH :						

REKAPITULASI :

	PPN	PPn BM
1. Tidak Dipungut/Ditunda/ Ditangguhkan	Rp.	Rp. .....
2. Dibebaskan/DTP	Rp. ..... +	Rp. ..... +
3. Jumlah PPN/PPn BM	Rp.	Rp. .....
4. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang PPN/PPn BM-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP	Rp. (.....)	Rp (.....)
5. Jumlah	Rp.	Rp .....

.....tgl..... ...

CATATAN :

*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah

**) Diisi dengan Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP sesuai yang diperlukan

Tanda tangan :

Nama jelas :

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - III
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM
KEPADA PEMUNGUT PPN

☐ Masa Pajak ....

☐ Pembetulan Masa Pajak ....ke-....

FORMULIR

1195 A3

NAMA P.K.P :

N.P.W.P :

N.P. P.K.P. :

Tgl. Pengukuhan PKP :

No.	Pemungut PPN	N.P.W.P	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	SSP Diterima/ Belum Diterima
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah (pindahkan ke Formulir 1195 A1 nomor urut II)							

REKAPITULASI :

	PPN	PPn BM
1. Jumlah Pajak keluaran yang SSP-nya telah diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.1 dan jumlah PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.1)	Rp.	Rp. .....
2. Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya belum diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.2 dan jumlah PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.2)	Rp. ..... +	Rp. ..... +
3. JUMLAH	Rp.	Rp. .....

.....tgl..... ...

Tanda tangan :

Nama jelas :

CATATAN :

*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - I
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG DAPAT DIKREDITKAN

☐ Masa Pajak ....

☐ Pembetulan Masa Pajak .... ke-....

FORMULIR

1195 B1

NAMA P.K.P : N.P.W.P : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

N.P. P.K.P. : ☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐ Tgl. Pengukuhan PKP : ☐☐ ☐☐ ☐☐

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P dan N.P. P.K.P	Faktur Pajak/ (PIUD +SSP)/SSP		PPN (Rupiah)	Keterangan *)
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl.SSP		
1	2	3	4	5	6	7
I	Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM					
1.						
2.						
3.						
dst.						
II	Lain-lain (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.5)					
	Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 Kode D.1.6)					
III	Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto :					
	1. Penyerahan Barang Kena Pajak = ... % x Rp					
	2. Penyerahan Jasa Kena Pajak = ...% x Rp					
	JUMLAH (pindahkan ke Formulir 1195 Kode D.2)					

REKAPITULASI :

A. Angka I dan II

1. Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.1) Rp .....
2. Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.2.) Rp. .....
3. Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.1) Rp. .....
4. Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.2.) Rp. .....+
5. Jumlah Pajak Masukan Rp. .....
6. Dikurangi PPN atas Retur Pembelian (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.4) Rp. (.....)
7. Lain-lain Rp. .....+
8. Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp. .....

.....tgl.....

Tanda tangan :

Nama jelas :

CATATAN :

*) Diisi dengan **"Masa Tidak Sama (MTS)"** bagi Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - II
DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM
YANG MEMPEROLEH PEMBAYARAN PENDAHULUAN DARI BAPEKSTA KEUANGAN

☐ Masa Pajak ....

☐ Pembetulan Masa Pajak . ... ke-....

FORMULIR

1195 B2

NAMA P.K.P : N.P.W.P : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

N.P. P.K.P. : ☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐ Tgl. Pengukuhan PKP : ☐☐ ☐☐ ☐☐

NO.	Nama PKP Penjual BKP/-Bank Devisa/Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P dan N.P P.K.P	Faktur Pajak/(PIUD + SSP)/SSP		PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl.SSP		
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH (pindahkan kolom (6) ke Formulir 1195 kode D.4.1)						

.....tgl..... ...

Tanda tangan :

Nama jelas :

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - III
HASIL PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN (PM) YANG TELAH DIKREDITKAN/TIDAK DIPUNGUT/DITANGGUHKAN/DIBEBASKAN

Tahun Buku ..... (bulan.....s.d. bulan.....)

☐ Pembetulan ke-....

FORMULIR

1195 B3 *)

NAMA P.K.P :

N.P.W.P : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

N.P. P.K.P. : ☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐ Tgl. Pengukuhan PKP : ☐☐ ☐☐ ☐☐

NO.	URAIAN	PENGHITUNGAN KEMBALI PM		
		KODE RUMUS	UNSUR-UNSUR (Rupiah)	HASIL (Rupiah)
1	2	3	4	5
I.	Penggunaan BKP/JKP secara bersama-sama untuk kegiatan usaha yang atas penyerahannya terutang PPN dan tidak terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)			
	a. Untuk bukan Barang Modal :			
	1. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir tahun Buku)	X		
	2. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3. kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	Y		
	3. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak Dipungut/ Ditangguhkan/Dibebaskan	PM		
	4. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan X .. x PM = ... Y			
	b. Untuk Barang Modal :			
	1. Jenis Barang Modal ☐ Bangunan ☐ Barang Modal Lainnya			
	2. Masa Manfaat Barang Modal ☐ Bangunan 10 Tahun ☐ Barang Modal Lainnya 5 Tahun	T		
	3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3. kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	X		
	4. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3. Kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	Y		
	5. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ Ditangguhkan/Dibebaskan	PM		
	6. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Ditangguhkan/Dibebaskan X PM .. x ..... = ... Y T			
	c. Jumlah (a.4 + b.6)			

NO.	U R A I A N	PENGHITUNGAN KEMBALI PM		
		KODE RUMUS	UNSUR-UNSUR (Rupiah)	HASIL (Rupiah)
1	2	3	4	5
II	Penggunaan Barang Modal untuk kegiatan lain.			
	1. Jenis Barang Modal : ☐ Bangunan ☐ Barang Modal Lainnya			
	2. Masa manfaat Barang Modal : ☐ Bangunan 10 Tahun ☐ Barang Modal Lainnya 5 Tahun	T		
	3. Persentase rata-rata penggunaan Barang Modal untuk kegiatan lain yang Tidak Terutang PPN dalam satu Tahun Pajak (rincian perhitungan agar dilampirkan) ...%	p'		
	4. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ Ditangguhkan/Dibebaskan	PM		
	5. Hasil penghitungan kembali Pajak masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan $p' \times \frac{PM}{T} = ...$			
III	Rekapitulasi : Jumlah hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan :			
	1. Penjumlahan angka I.c seluruh lampiran 1195 B 3 ini			
	2. Penjumlahan angka II.5 seluruh lampiran 1195 B 3 ini			
	3. Jumlah (pindahkan ke Formulir 1195 Kode D.4.2)			

.....tgl..... ...

Tanda tangan :

Nama jelas :

Catatan :

*) Formulir 1195 B3 ini dilampirkan hanya 1 (satu) kali yaitu pada SPT Masa PPN dari suatu Masa Pajak yang dipilih diantara 3 (tiga) Masa Pajak berikutnya setelah berakhirnya Tahun Buku.

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - IV
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

☐ Masa Pajak ....

☐ Pembetulan Masa Pajak .... K e-....

FORMULIR

1195 B4

NAMA P.K.P :

N P W P :

N.P. P.K.P : Tgl. Pengukuhan PKP :

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa/ Dit Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P dan N.P. P.K.P	Faktur Pajak/ (PIUD + SSP)/SSP		PPN (Rupiah)	Keterangan *)
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl SSP		
1	2	3	4	5	6	7
I	Faktur Pajak Sederhana					
II	Faktur Pajak Standar					
1 2. 3. dst.						
	Jumlah (pindahan ke Formulir 1195 huruf F)					

CATATAN :

*) Diisi "Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP" bila Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan atas impor atau perolehan BKP/JKP yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP

Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Formulir 1195 B.4. ini diisi dengan strip (-) atau NIHIL.

.....tgl.....

Tanda tangan :

Nama jelas :

KP.PPN 1.1.7 - 95

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (SPT MASA PPn BM)

☐ Masa Pajak ....

☐ Pembetulan Masa Pajak .... Ke .....

FORMULIR

1195 BM

PERHATIAN : - DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK - BERI TANDA X DALAM ☐ YANG SESUAI
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK - ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK

1. N P W P : ☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ Kode Cabang : ☐☐
2. N P P K P : ☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐ Tanggal ☐☐ ☐☐ ☐☐ Perubahan Identitas :
3. Nama PKP :
4. A l a m a t : Kode Pos ☐☐☐☐
5. Nomor Telepon :
6. Merek Usaha :
7. Ijin Sentralisasi : No. Tanggal ☐☐ ☐☐ ☐☐
8. Jenis Usaha : K L U ☐☐☐☐☐

☐ Nama Baru
☐ Alamat Baru
☐ No. Telepon Baru
☐ Jenis Usaha

B. EKSPOR DAN PENYERAHAN DALAM NEGERI	KODE KOLOM	PEMBETULAN (p)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) Bulan ini	s.d Bulan ini
1. Ekspor				
1.1. Dengan L/C	B.1.1			
1.2. Tanpa L/C	B.1.2			
2. Penyerahan Dalam Negeri				
2.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN				
2.1.1. Dikenakan tarif 10 %	B.2.1.1			
2.1.2. Dikenakan tarif 20 %	B.2.1.2			
2.1.3. Dikenakan tarif 25 %	B.2.1.3			
2.1.4. Dikenakan tarif 35 %	B.2.1.4			
2.1.5. Dikenakan tarif ... %	B.2.1.5			
2.1.6. Jumlah (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5)	B.2.1.6			
2.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN				
2.2.1 Dikenakan tarif 10 %	B.2.2.1			
2.2.2. Dikenakan tarif 20 %	B.2.2.2			
2.2.3. Dikenakan tarif 25 %	B.2.2.3			
2.2.4. Dikenakan tarif 35 %	B.2.2.4			
2.2.5. Dikenakan tarif .... %	B.2.2.5			
2.2.6. Jumlah (2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 + 2.2.5)	B.2.2.6			
3. Penyerahan yang PPn BM-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/ Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	B.3			
4. Jumlah Penyerahan Dalam Negeri (2.1.6 + 2.2.6 + 3)	B.4			
5. Dikurangi Retur Penjualan	B.5			
6. Jumlah Ekspor dan Penyerahan Dalam Negeri (1.1 + 1.2 + 4 + 5)	B.6			

C.	PPn BM ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI	KODE KOLOM	PEMBETULAN (p)	PPn BM	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Dengan tarif 10% yaitu 10% x (jumlah kode B.2.1.1 + B.2.2.1)	C.1			
2.	Dengan tarif 20% yaitu 20% x (jumlah kode B.2.1.2 + B.2.2.2)	C.2			
3.	Dengan tarif 25% yaitu 25% x (jumlah kode B.2.1.3 + B.2.2.3)	C.3			
4.	Dengan tarif 35% yaitu 35% x (jumlah kode B.2.1.4 + B.2.2.4)	C.4			
5.	Dengan tarif ....% yaitu ....% x (jumlah kode B.2.1.5 + B.2.2.5)	C.5			
6.	Jumlah (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	C.6			
7.	Dikurangi PPn BM atas Retur Penjualan	C.7			
8.	Dikurangi PPn BM yang dipungut oleh Pemungut PPN				
	8.1. SSP sudah diterima (terlampir)	C.8.1			
	8.2. SSP belum diterima	C.8.2			
9.	PPn BM yang harus disetor (6 - 7 - 8.1 - 8.2)	C.9			
	Jumlah pada Kode C.9 telah dilunasi tanggal				
D.	PPn BM ATAS IMPOR DAN PEROLEHAN DALAM NEGERI				
1.	Dengan tarif 10%	D.1			
2.	Dengan tarif 20%	D.2			
3.	Dengan tarif 25%	D.3			
4.	Dengan tarif 35%	D.4			
5.	Dengan tarif ...%	D.5			
6.	Jumlah (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	D.6			
E.	PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)				
	Hasil pembetulan 1. ☐ Kurang dibayar	E.1			
	2. ☐ Lebih dibayar	E.2			
	Jumlah pada Kode E 1 telah dilunasi tanggal				

F. LAMPIRAN

1. ☐ Surat Keterangan tersebut pada Kode B.3
2. ☐ Surat Kuasa Khusus tersebut pada Kode G.2
3. ☐ Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak tersebut pada ☐ Kode C.8.1 ☐ Kode C.9 ☐ Kode E.1
4. ☐ Lembar ke-3 SSP yang diterima dalam bulan ini dari Kode C.8.2 SPT Masa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bulan-bulan yang lalu sebanyak ..... lembar = Rp.
5. ☐ .....

G. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat

PERHATIAN :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1994 apabila SPT masa yang Saudara sampaikan tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

.....Tgl. ....

Tanda tangan

Nama Jelas

1. ☐ PKP
2. ☐ Kuasa

Cap Perusahaan (jika ada) :

H. DIISI OLEH DINAS

Diterima	Dicatat	Diedit	Direkam	Rik. Sederhana	Rik. Lengkap	Berkas (arsip)

1. ☐ Tepat waktu
2. ☐ Terlambat

Lampiran 2

Lampiran 1
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP - 511/PJ./2001
Tanggal : 13 Juli 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

☐ Masa Pajak ..... 20 .....

☐ Pembetulan Masa Pajak ..... 20 ..... Ke - ..... (.....)

FORMULIR
1101 PUT

PERHATIAN :
- BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA BAGI PEMUNGUT PPN
- DIISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BERI TANDA X DALAM ☐ YANG SESUAI
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK
- ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. N.P.W.P : ☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐.☐☐☐.☐☐☐
2. Nama Pemungut :
3. Alamat :
   Kode Pos : ☐☐☐☐☐
4. Nomor Telepon : Nomor Faksimile :
5. Kegiatan Usaha :

Perubahan Identitas :
☐ Nama Baru
☐ Alamat Baru
☐ Nomor Telepon Baru

B. PEMBAYARAN ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK YANG DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)

	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	
			Bulan ini	s.d. Bulan ini
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)				
1.1. Pembayaran yang dipungut PPN	B.1.1			
1.2. Pembayaran yang PPN nya dipungut melalui Kantor Perbendaharaan dan kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah	B.1.2			
1.3. Pembayaran yang PPN nya harus dipungut sendiri (kode B.1.1 - kode B.1.2)	B.1.3			
2. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM)				
2.1. Pembayaran yang dipungut PPn BM	B.2.1			
2.2. Pembayaran yang PPn BM nya dipungut melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah	B.2.2			
2.3. Pembayaran yang PPn BM nya harus dipungut sendiri (kode B.2.1 - kode B.2.2)	B.2.3			

C. PAJAK YANG HARUS DIPUNGUT DAN DISETOR

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)			
1.1. PPN yang harus dipungut dan disetor	C.1.1		
1.2. PPN yang dipungut dan disetor melalui Kantor Perbendaharaan dan kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah	C.1.2		
1.3. PPN yang dipungut dan disetor sendiri (kode C.1.1 - kode C.1.2)	C.1.3		
2. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM)			
2.1. PPn BM yang dipungut dan disetor	C.2.1		
2.2. PPn BM yang dipungut dan disetor melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah	C.2.2		
2.3. PPn BM yang dipungut dan disetor sendiri (kode C.2.1 - kode C.2.2)	C.2.3		

D. LAMPIRAN

1. ☐ FORMULIR 1101 PUT 1
2. ☐ FORMULIR 1101 PUT 2
3. ☐ SURAT KUASA KHUSUS TERSEBUT PADA E.2
4. ☐ FOTOKOPI SSP LEMBAR KE-5 TERSEBUT PADA C.1.3 DAN C.2.3
   SEBANYAK ..... LEMBAR Rp.
5. ☐ FAKTUR PAJAK LEMBAR KE-3 TERSEBUT PADA C.1.3 DAN C.2.3 SEBANYAK ..... LEMBAR
6. ☐ FOTOKOPI FAKTUR PAJAK TERSEBUT PADA C.1.2 DAN C.2.2 SEBANYAK ..... LEMBAR

Lampiran 1
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP - 511/PJ./2001
Tanggal : 13 Juli 2001

E. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat.

PERHATIAN :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan

....., Tgl. ..... 20 .....
Pemungut Pajak / Bendaharawan

Tanda tangan :
Nama Jelas :

Cap Pemungut/Kantor/Instansi

1. ☐ Pemungut
2. ☐ Kuasa

F. DIISI OLEH DINAS

Diterima	Dicatat	Diteliti	Direkam	Rik. Sederhana	Rik Lengkap	Berkas (arsip)

1. ☐ Tepat waktu
2. ☐ Terlambat

F.1.2.32.01

Lampiran 1
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP - 511/PJ./2001
Tanggal : 13 Juli 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I
DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR MELALUI KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA ATAU KAS DAERAH/BANK PEMBANGUNAN DAERAH SELAKU KAS DAERAH

☐ Masa Pajak ..... 20 .....

☐ Pembetulan Masa Pajak ..... 20 ..... Ke - ..... (.....)

FORMULIR
1101 PUT 1

NAMA PEMUNGUT :

N.P.W.P. : ☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐.☐☐☐.☐☐☐

No.	Nama & N.P.W.P Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan	FAKTUR PAJAK						Keterangan
			Nomor Seri	Tgl.	Dasar Pengenaan PPN (Rp)	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPn BM (Rp)	PPn BM (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
JUMLAH									

Catatan :
1. Pindahkan jumlah pada angka (7) ke kolom C.1.2 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT);
2. Pindahkan jumlah pada angka (9) ke kolom C.2.2 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT);

D.1.2.32.02

Lampiran 1
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP - 511/PJ./2001
Tanggal : 13 Juli 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II
DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR SENDIRI

☐ Masa Pajak ..... 20 .....

☐ Pembetulan Masa Pajak ..... 20 ..... Ke - ..... (.....)

FORMULIR
1101 PUT 2

NAMA PEMUNGUT :

N.P.W.P. : [ ] . [ ] [ ] [ ] . [ ] [ ] [ ] . [ ] . [ ] [ ] [ ] . [ ] [ ] [ ]

No.	Nama & N.P.W.P Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan	FAKTUR PAJAK						Tanggal SSP		Keterangan
			Nomor Seri	Tgl.	Dasar Pengenaan PPN (Rp)	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPn BM (Rp)	PPn BM (Rp)	PPN	PPn BM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
JUMLAH											

Catatan :
1. Pindahkan jumlah pada angka (7) ke kolom C.1.3 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT);
2. Pindahkan jumlah pada angka (9) ke kolom C.2.3 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT);

D.1.2.32.02

Lampiran 3

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

UNIVERSITAS TEKNIS PERUSTAKAAN ITKOM

NPWP : ☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐-☐☐☐.☐☐☐
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : .....

ALAMAT : .....
.....

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
☐☐☐☐	☐☐☐	.....

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun ☐☐☐☐
Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ☐☐☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh

Rp. .....

Terbilang : .....
.....
.....
.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 2

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : ☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐-☐☐☐.☐☐☐

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : .....

ALAMAT : .....

.....

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
☐☐☐☐	☐☐☐	.....
		.....
		.....
		.....

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun ☐☐☐☐

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ☐☐☐☐☐☐ / ☐☐☐☐☐ / ☐☐☐☐ / ☐☐☐☐☐ / ☐☐

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh

Rp. .....

Terbilang : .....

.....

.....

.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 3

Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP

NPWP : ☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐-☐☐☐.☐☐☐

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : .....

ALAMAT : .....

.....

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
☐☐☐☐	☐☐☐	.....
		.....
		.....
		.....

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun ☐☐☐☐

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ☐☐☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh

Rp. .....

Terbilang : .....
.....
.....
.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 4

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : ☐☐.☐☐☐.☐☐☐.☐-☐☐☐.☐☐☐

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : .....

ALAMAT : .....

.....

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
☐☐☐☐	☐☐☐	.....
		.....
		.....
		.....

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun ☐☐☐☐

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ☐☐☐☐☐/☐☐☐/☐☐/☐☐☐☐/☐☐

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh

Rp. .....

Terbilang : .....
.....
.....
.....

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran	Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal	**....., tgl .....**
Cap dan tanda tangan	*Cap dan tanda tangan*
Nama Jelas :	**Nama Jelas : .....**

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

Lampiran 4

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX JAWA BAGIAN BARAT II
KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES

Jalan Kiaracondong No. 372
Bandung 40275

Telepon : (022) 7303628, 7333180, 7333355
Faksimili : (022) 7304730

Nomor : S- /WPJ.09/KP.0507/2003
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permintaan Klarifikasi Data Pajak Keluaran

2003

Kepada Yth:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Cirebon
Jl Evakuasi No 9
Cirebon 45135

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Perpajakan tanggal 19 Mei 2003, dengan ini disampaikan bahwa dari data Pajak Masukan Pengusaha Kena Pajak:

Nama PKP
N P W P
Alamat

diketahui ternyata bahwa data Pajak Keluaran dari PKP Penjual yang terdaftar pada kantor Saudara (terlampir) tidak tersedia atau datanya tidak sesuai. Kami mengharapkan agar Saudara dapat memberikan penjelasan atau tanggapan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya surat ini. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat ini terima, Saudara belum/tidak memberikan penjelasan atau tanggapan maka Faktur Pajak tersebut akan dianggap ada dan akan diperhitungkan sebagai Pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

NIP.

PERMINTAAN KLARIFIKASI DATA PAJAK KELUARAN

Nama PKP Pembeli
N P W P
Masa Pajak

No	Faktur Pajak		PKP Penjual		Jumlah PPN (Rp)	Jawaban Permintaan Klarifikasi (A/B/C/D/E/F/G)	Pen jelasan
	Nomor	Tanggal	Nama	NPWP			
Jumlah					0		

Jawaban Permintaan Klarifikasi diisi sebagai berikut :

A Ada dan sesuai (FP belum direkam)
B Ada dan sesuai (FP terlambat dilaporkan PKP)
C Ada tetapi tidak sama tgl dan atau kode nomor seri FP
D Tidak ada (FP belum dilaporkan dan sudah diterbitkan SKPKB/SKPKBT)
E Tidak ada (FP tidak sah karena Wajib Pajak belum dikukuhkan sebagai PKP)
F Tidak ada (FP tidak sah karena PKP tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP)
G Lain-lain (Jelaskan)

Yang Memberi Klarifikasi
Kepala Kantor,

.....
NIP.

Yang Meminta Klarifikasi
Kepala Kantor pelayanan Pajak
Bandung Karees

NIP.

Lampiran 5

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX JAWA BAGIAN BARAT II
KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES
Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung - 40275
Telepon : 7333180, 7333355, 7303628 Faksimili : 73034370

Nomor : S. / WPJ.09 / KP.0507 / 2003
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Jawaban Konfirmasi PPN

Bandung, ... 2003

K e p a d a

Yth. .....
.....
.....
.....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara No. ..... tanggal ..... 20 ..... Perihal Permintaan Konfirmasi atas Bukti Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, maka berdasarkan data yang ada pada tata usaha kami dapat diberikan jawaban konfirmasi tentang bukti pemungutan PPN yang Saudara mintakan seperti tertera pada daftar terlampir.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA KANTOR

M.N. JAELANI
NIP. 060041124

Model KP Set 1.2

Lampiran 6

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX JAWA BAGIAN BARAT II
KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES

Jl. Kiaracondong No. 372
Bandung - 40275

Telp : 7333180/7333355
Fax : 7304730

Nomor : S- / WPJ.09 / KP.0507 / 2003 Bandung,..... 2003
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Pertanggungjawaban Faktur Pajak PPN

Kepada Yth.
.....
.....
.....
.....
.....

Sehubungan dengan permintaan konfirmasi dari .....
..... dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

1. Setelah diteliti ternyata Faktur Pajak :

Tanggal	Nomor Seri	Nilai PPN (Rp)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Dalam laporan SPT Masa PPN .....
.....
kenaan dengan itu diminta Saudara untuk memberikan penjelasan perihal tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat ini diterima.

2. Apabila Saudara tidak memberikan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut telah dipertanggungjawabkan, maka kami akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

Drs. M.N. JAELANI
NIP. 060041124

Tembusan :
1. .....
2. .....

Lampiran 7

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

BEBAS BEA

KEPADA :

Yth.

SURAT TEGORAN

No. :

NPWP :

No. Pengukuhan PKP :

Menurut catatan pada tata usaha kami, Saudara belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak 19 , yang batas waktu penyampaiannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari masa pajak tersebut diatas.

Oleh karenanya kami minta agar Saudara menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa tersebut dalam jangka waktu ( ) hari sejak tanggal Surat Tegoran ini.
Apabila sesudah batas waktu tersebut Surat Pemberitahuan Masa belum juga disampaikan, kami akan menerapkan sanksi Pasal 13 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1983.
Dalam hal Saudara telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak tersebut di atas, kami harapkan copynya dikirimkan kepada kami untuk dicatat dalam tata usaha kami.

Terima kasih atas kerjasama Saudara.

A.n. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK.

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN AKUNTANSI
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP (022) 2504114, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 152 TELP (022) 2504137, FAX 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP (022) 2500154, 2508805 BANDUNG 40132

Surat Keterangan Hasil Kuliah Kerja Praktek
Dari Perusahaan / Instansi

Yang bertanda tangan dibawah ini Personil Pembina KKP :

Nama : THOMSON PAIMA
Jabatan : PELAKSANA
Nama Perusahaan : KPP PRATAMA BANDUNG KAREES
Alamat Perusahaan : JL. JAPACONDONG 372 BANDUNG

Menyatakan bahwa :

Nama : IRNA UMAMI
NIM / NIRM : 21.30.1095
Jurusan / Jenjang : AKUNTANSI

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek (KKP) pada perusahaan / instansi kami, terhitung mulai tanggal ...1-8-03.....sampai dengan tanggal .....4-9-03.., pada Bidang Kajian : ...PPN.....
Adapun hasil Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan dapat kami laporkan sbb :

Materi Penilaian :	Nilai (dalam angka 0 s/d 100)
1. Kedisiplinan	(...85.....)
2. Penguasaan Materi Pekerjaan	(...85.....)
3. Kreativitas	(...85.....)
4. Laporan	(...86.....)
Total Nilai	...341.....

Nilai Rata – rata : Total Nilai / 4 = 341 / 4 = 85

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, untuk pertimbangan hasil/nilai Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan.
Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 4-9-03

Mengetahui,
a/n. Pimpinan ~~Perusahaan~~ Instansi

(Lontas Marpaung, SH)
Nip 060065525

Personal Pembina,

(THOMSON P)
NIP 060088570

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN AKUNTANSI
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132

SURAT KETERANGAN HASIL KULIAH KERJA PRAKTEK

Dari Dosen Pembimbing

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing KKP :

Nama : Ely Suhayati SE Ak
NIP : 4127.34.03.006
Jabatan : Dosen tetap Jurusan Akuntansi

Menyatakan bahwa :

Nama : Irna Umami
NIM / NIRM : 21301045
Jurusan / Jenjang : Akuntansi / Diploma - III

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2003 **Sampai dengan tanggal** 25 Agustus 2003 **pada Bidang Kajian :** Perpajakan

Adapun hasil Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan dapat kami laporkan sbb :

Materi Penilaian	Nilai (dengan angka 0 – 100)	Nilai Akhir *)
1. Kedisiplinan	(80)	A = Sangat Baik
2. Penguasaan Materi Pekerjaan	(80)	B = Baik
3. Kreativitas	(80)	C = Cukup
4. Laporan	(80)	D = Kurang
Total Nilai	(320)	E = Gagal

Nilai Rata – rata : $\frac{\text{Total Nilai}}{4} = \frac{320}{4} = 80$ (A)

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu.

Atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Bandung, 21 Januari 2004
Dosen Pembimbing

(Ely Suhayati SE Ak)

*) Lingkari yang cocok.

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN AKUNTANSI
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430- BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132

DAFTAR KEHADIRAN MAHASISWA/I UNIKOM

Nama Perusahaan : KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES
Alamat Perusahaan : Jl. Kiara Condong No. 372 Bandung
Pembimbing Perusahaan : .....
Nama Mahasiswa/i : IRNA UMAMI
Nim : 21301045

No	Hari/Tanggal	Jam Masuk	Jam Pulang	Paraf
1	01 - Agustus - 2003	07 - 30 WIB	12 - 00 WIB	
2	04 - Agustus - 2003	07 - 30 WIB	12 - 00 WIB	
3	05 - Agustus - 2003	07 - 30 WIB		
4	06 - Agustus - 2003	07 - 30 WIB		
5	07 - Agustus - 2003	07 - 30 WIB		
6	08 - Agustus - 2003	07 - 30 WIB		
7	11 - Agustus - 2003	07 - 30 WIB		
8	12 - Agustus - 2003	07 - 30 WIB		
9	13 - Agustus - 2003	07 - 30 WIB		
10	14 - Agustus - 2003	07 - 30 WIB		
11	15 - Agustus - 2003	07 - 30 WIB		
12	18 - Agustus - 2003	07 - 30 WIB		
13	19 - Agustus - 2003	07 - 30 WIB		
14	20 - Agustus - 2003	07 - 30 WIB		
15	21 - Agustus - 2003	07 - 30 WIB		
16	22 - Agustus - 2003	07 - 30 WIB		
17	25 - Agustus - 2003	07 - 30 WIB		
18	26 - Agustus - 2003	07 - 30 WIB		
19	27 - Agustus - 2003	07 - 30 WIB		
20	28 - Agustus - 2003	07 - 30 WIB		
21	29 - Agustus - 2003	07 - 30 WIB		
22	01 - September - 2003	07 - 30 WIB		
23	02 - September - 2003	07 - 30 WIB		
24	03 - September - 2003	07 - 30 WIB		
25	04 - September - 2003	07 - 30 WIB		

.....200....

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

Pejabat Penilai

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES

Nip:

(Nama, Tandatangan & Cap)


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

RIWAYAT HIDUP

Nama	: Irna Umami
Tempat/Tgl.lahir	: Cimahi/25-April-1982
NIM	: 21301045
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Jenjang	: Diploma III
Alamat	: Kompleks Pasirjati Jl. Pasirjati Endah No. 62/30 Rt.01 Rw.06 Ujungberung Bandung.

Pendidikan:

Sekolah Dasar Negeri Cijambe IV dari tahun 1988 s/d 1994

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 50 Bandung dari tahun 1994 s/d 1997

Sekolah Menengah Umum Karya Pembangunan 2 Bandung dari tahun 1997 s/d 2000

Universitas Komputer Indonesia dari tahun 2001 sampai dengan sekarang.